

**DAMPAK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

By:

DIAN MARINI

1101120400

Email : Dianmarini240@yahoo.com

Supervisor : Drs . H. Nurhamlin , M. Si

**Department of Sociology - Sociology Prodi
Faculty of Social Science and Political Science
University of Riau**

Kampus.bina widya Jl HR Soebrantas Km.12.5 Simp.baru pekanbaru 28293.telp / fax 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to determine how the impact of cash transfers to the poor in the village of West Perawang , how the distribution of cash transfers were held and anyone who get these cash transfers . The research was conducted in the village of West Perawang Siak District of tramp . This study used a descriptive quantitative method by using data retrieval poor people who get cash aid in Perawang West Village Head Office , to know clearly who the people who get the BLT . To collect the data of the respondents used the method of direct observation , interviews , documentation , and management of data used for descriptive quantitative method . The government has also tried to solve the existing poverty by creating programs that they deem to reduce poverty . One of the government programs are BLT , BLT is a program created by the government for the welfare of the poor and helped the poor to meet their basic needs , to strengthen the program the President issued Presidential Decree No. 3 of 2008 on the BLT . The results of this study are bahwasannya the community wants this BLT deleted because they were disappointed with the process and the target , the public is also advised BLT should be replaced with other policies that better understand the poor people , not merely maintain the image of the Government alone.

Keywords : welfare , poverty , direct cash assistance program

Latar belakang

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Angka kemiskinan di Provinsi Riau pada Maret 2012 adalah 483,07 ribu orang, jika dibandingkan dengan penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2011 adalah 482,05 ribu orang, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebanyak 1,0 ribu jiwa. Angka kemiskinan pada bulan Maret 2011 – Maret 2012 ini yang terjadi di pedesaan mengalami penurunan atau mengalami pengurangan sekitar 5,2 ribu jiwa, tetapi di Daerah perkotaan kemiskinan mengalami peningkatan atau mengalami kenaikan sekitar 6,3 ribu jiwa. Sebuah jalan keluar bagi masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin, Menkokesra menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini dapat menimbulkan ancaman yang serius bagi masyarakat miskin, oleh karena itulah pemerintah menyiapkan empat kompensasi bantuan langsung (BLT) tunai yaitu raskin, program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM), dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) ini dulunya di sebut dengan BLT. Agar program BLT ini dapat berjalan dengan lancar maka Presiden mengeluarkan Inpres no 12 tahun 2005, pada tanggal 10 september 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin. Demikian pula pada tahun 2008 Presiden kembali mengeluarkan inpres no 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran, di sini rumah tangga sasaran menurut Instruksi Presiden adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. fenomenanya yaitu pemberian BLT ini memang di khususkan hanya untuk masyarakat miskin saja tetapi pada

kenyataannya orang kera atau orang yang masih di anggap mampu ternyata juga mendapatkan BLT ini sedangkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkannya. Pemberian BLT ini bukannya di berikan sebulannya saja tetapi di berikan 3x dalam bulan yang berbeda dengan berturut misalnya pemberian itu di lakukan pada bulan september lalu di lanjutkan kembali pada bulan oktober dan november, tetapi kenyataan yang di dapat atau di terima oleh masyarakat itu hanya sebulan saja pemberian BLT itu berlangsung. Ada masyarakat yang tidak bisa mencairkan dana tersebut, pada saat mengambil uang BLT tersebut masyarakat yang mendapatkan “kartu perlindungan social” terlebih dahulu membawa KTP dan KK dan di perlihatkan kepada petugas pembagian dana BLT tersebut, ada masyarakat yang setelah di perlihatkan persyaratan tersebut petugas mengatakan bahwasannya KPS tersebut tidak dapat di pergunakan lagi.

Desa Perawang Barat saja contohnya penerimaan BLT yang harusnya sebanyak 3 kali berturut-turut saja hanya menerima 1 kali bantuan saja. Sebenarnya apa yang menyebabkan semua ini dapat terjadi? Apakah dari kalangan pemerintahnya yang suka mengkorupsi hak milik orang miskin atau dari pendataannya yang salah? Oleh sebab itulah si peneliti ingin meneliti tentang bantuan langsung tunai di kawasan desa perawang barat kabupaten siak ini dengan judul evaluasi bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Oleh sebab itulah penulis ingin meneliti bagaimana DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP MASYARAKAT DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penetapan pembagian BLT di Desa Perawang Barat pada tahun 2013 ?
- b. Siapa saja penduduk miskin yang menerima BLT pada tahun 2013 ?
- c. Bagaimana dampak BLT terhadap masyarakat miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara penetapan pembagian BLT di Desa Perawang Barat pada tahun 2013
- b. Untuk mengetahui penduduk miskin yang mendapatkan BLT di Desa Perawang Barat pada tahun 2013
- c. Untuk mengetahui dampak BLT terhadap penduduk miskin di Desa Perawang Barat

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1).
- b. Secara teoritis ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan sosial dan kemajuan untuk pembentukan program baru di pemerintahan.
- c. Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

Pengertian Kemiskinan

kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang,

sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan Negara. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Menurut **Kartasamita dalam Alpen Disman**(2012) kemiskinan itu disebut dengan “accidental poverty” yaitu kemiskinan karena dampakdari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “kurangnya kemampuan esensial manusia terutama dalam hal ‘kemelekan huruf’ (kemampuan membaca; literacy) serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu, diartikan pula sebagai kurangnya pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum. Menurut **Soerjono Soekanto** Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Budaya Kemiskinan

Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan

frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.

Menurut **Lewis** (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggup). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. (**Andika, 2011**) Menurut **Kuncoro** (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Penyebab Kemiskinan

Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya kemiskinan.

Penyebab kemiskinan menurut **Kuncoro** (2000) sebagai berikut:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
- c. kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal, Ismawan mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian

manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Karakteristik Masyarakat Miskin

Sebagian masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60%), sebagian besar (60%) berpenghasilan rendah dan mengkonsumsi energi kurang dari 2.100 kalori/hari, berdasarkan indikator silang proporsi pengeluaran pangan besar dari 60% dan kecukupan gizi kurang dari 80% proporsi rumah tangga rawan pangan nasional mencapai sekitar 30% penduduk miskin dengan tingkat sumber daya yang rendah umumnya tinggal di wilayah marginal, dukungan infrastruktur yang terbatas dan tingkat adopsi yang rendah (Pasaribu 2006).

Kesejahteraan

Menurut **Suharto** (2013) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut: Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama

pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada.

Menurut **Fredlander dalam Susnawita** (2009) kesejahteraan sosial adalah suatu system yang terorganisasi dari pada pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Penanggulangan Kemiskinan

Program-program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 4 (empat) untuk mempertajam focus pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Klaster 1, Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan akses pelayanan dasar antara lain melalui makanan, kesehatan dan pendidikan.
2. Klaster 2, Program Pemberdayaan Masyarakat (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM) yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Klaster 3, Program Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang dilaksanakan dengan tujuan membantu usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas usahanya agar

kehidupan masyarakat miskin semakin stabil dan pendapatan meningkat.

4. Klaster 4, Program Pro Rakyat yang dilaksanakan dengan tujuan melengkapi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan dan membantu kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan termajinalkan.

Konsep Operasional

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis, maka dapat di susun konsep operasional sebagai berikut :

- Pembagian bantuan langsung tunai di sini merupakan sebuah bantuan yang di buat oleh Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ada.
- Bantuan langsung tunai adalah suatu bantuan yang di buat oleh Pemerintah yang memiliki tujuan yaitu untuk membantu masyarakat miskin yang ada, untuk mengurangi kemiskinan yang ada, dan sasaran dari bantuan ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki penghasilan 1.500.000/ bln, dan masyarakat yang memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak.
- Masyarakat miskin yang menerima bantuan ini yang berhak, maupun tidak berhak dapat kita teliti dengan cara berapa jumlah pengeluaran mereka perbulannya, apa pekerjaan yang mereka miliki, berapa banyak jumlah tanggungan yang mereka miliki, dan apa saja aset yang telah mereka miliki selama bertempat tinggal di Desa Perawang Barat.
- Dampak bantuan ini dapat dilihat dari bagaimana tanggapan masyarakat terhadap prose bantuan

tersebut, terhadap manfaat dari bantuan tersebut, dan bagaimana proses dari bantuan tersebut.

Lokasi penelitian

Perawang adalah ibu kota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Tualang Perawang atau lebih di kenal "Perawang" dengan jumlah penduduk 102.306 jiwa merupakan kota industri di pinggir Sungai Siak. Luas daerah Perawang yakni 373,75 km².

Populasi dan sampel

Pepulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan BLT di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random sampling (pengambilan sampel secara acak sederhana). Sample yang diambil dan digunakan untuk penelitian yang karakteristiknya dapat mewakili populasi sebagai subjek penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 299 KK dan jumlah sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 75 KK.

Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data yang di kumpulkan langsung dari responden yang akan di teliti sehingga penulis bisa mengambil langsung data yang ada dengan metode wawancara terhadap responden dengan mendapatkan informasi dengan data yang berisi tentang fakta, apa saja yang menyebabkan pembagian BLT ini tidak merata dan kriteria masyarakat seperti apa yang sebenarnya mendapatkan BLT ini.

b. Data skunder

Data yang erat kaitannya dengan masalah penelitian, yang di peroleh dari buku-buku, skripsi-skripsi yang pernah membahas judul yang sama serta pihak-pihak yang bersangkutan mulai dari sumber-

sumber yang berkaitan dengan fakta yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang di ambil yaitu data primer yang langsung di kumpulkan dari lapangan yaitu dengan terjun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang di butuhkan penelitian lapangan dilakukan dengan teknik.

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan.

b. Dokumentasi

Dimana penulis memperoleh data-data langsung yang berada di lapangan, tempat si penulis melakukan penelitian.

c. Wawancara

Dimana penulis atau si peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang di tuju guna untuk mendapatkan informasi yang ingin di ketahui oleh si peneliti.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang di peroleh penulis menggunakan metode kuantitatif inferensial. Untuk mempermudah peneliti melakukan analisis maka dalam analisis data menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service solutions*).

Program Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai itu dapat didefinisikan sebagai bantuan Pemerintah dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada rumah tangga miskin akibat dari dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tujuan Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar-belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat

adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tujuan pemberian Bantuan Langsung Tunai tersebut adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai

Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.

Kelemahan Bantuan Langsung Tunai

Berkaca pada kebijakan BLT di masa lalu (kebijakan BLT tahun 2005) banyak kelemahan-kelemahan dan masalah-masalah yang akan ditimbulkan oleh kebijakan BLT ini, antara lain :

1. Kebijakan BLT bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintahan terhadap kebijakan tersebut
3. Validitas data masyarakat miskin yang diragukan sehingga akan berdampak pada ketepatan pemberian dana BLT kepada masyarakat yang berhak.
4. Kebijakan BLT memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat

5. Peran aktif masyarakat yang kurang/minim, sehingga optimalisasi kinerja program yang sulit direalisasikan
6. Dari sisi keuangan negara, kebijakan BLT merupakan kebijakan yang bersifat menghambur-hamburkan uang negara karena kebijakan tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktifitas masyarakat miskin
7. Data yang di berikan kepada pusat tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan data tersebut adalah data yang di gunakan pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak adanya pembaharuan data.

Program Raskin

Program raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran.

Tujuan Raskin

Program raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Sasaran Program Raskin

Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI.

Program Jamkesmas

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Semenjak diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) semenjak 1 Januari 2014, maka program Jamkesmas melebur kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Masyarakat miskin dan hampir miskin yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas akan secara otomatis menjadi peserta JKN ini.

Kriteria Objektif Normatif

Masyarakat Perawang adalah masyarakat yang memiliki sifat individualis, sewaktu peneliti mewawancarai Bapak Kepala Desa peneliti bertanya tentang bagaimana proses penyaluran BLT yang ada di Desa Perawang Barat, Bapak kepala Desa menyatakan bahwasannya kebanyakan yang menerima BLT di Desa Perawang Barat adalah masyarakat yang masih dapat di katakana mampu, saat pengambilan BLT tersebut ada masyarakatnya yang mengenakan emas, seharusnya BLT di berikan kepada masyarakat miskin yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, memiliki jumlah keluarga yang banyak, tetapi karena tidak ada pengecekan langsung dari pemerintah pusat ke Daerah yang mendapatkan BLT maka pembagian BLT tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Menurut narasumber ada beberapa kriteria yang dapat di terapkan di Desa Perawang Barat dalam pembagian BLT ini adalah :

4. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan yang serabutan.
5. Penghasilan perbulannya kurang dari Rp1.500.000.
6. Tempat tinggal dalam status sewa atau numpang.

7. Melakukan pengobatan hanya di puskesmas terdekat.

Karakteristik Penduduk Miskin Di Desa Perawang Barat

penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya karakteristik penduduk miskin di Desa Perawang Barat yang mendapatkan BLT adalah masyarakat yang sudah lama menetap di tempat tersebut, masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan Rp1.501.000-2.000.000, masyarakat yang mendapatkan BLT ini lebih dominan adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan IKPP, tingkat pendidikannya yang paling banyak adalah tamatan SMU/ sederajat, dalam hal kepemilikan rumah masyarakat yang mendapatkan BLT ini memiliki kepemilikan rumah secara pribadi, dan dalam hal perkumpulan yang diadakan oleh Desa tersebut masyarakatnya masih kadang-kadang mengikutinya ini semua disebabkan oleh sifat individualis yang sudah terlekat dengan masyarakat Perawang.

kebijakan BLT tersebut lebih mudah mencari dampak yang negatifnya dari pada yang positifnya ini semua memperlihatkan bahwasannya kebijakan BLT belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dapat menuntaskan kemiskinan akan tetapi BLT itu dapat menambah jumlah kemiskinan yang ada, apabila Pemerintah masih memberikan kebijakan-kebijakan seperti ini harusnya bukanlah hanya semata-mata untuk mempertahankan citra Pemerintah yang peduli dengan masyarakat miskin dan janganlah Pemerintah sekali-kali mengkambing hitamkan kemiskinan tersebut dalam pesta politik, apabila pemerintah memang benar-benar peduli terhadap masyarakat miskin seharusnya pemerintah jangan memberikan kebijakan yang berupa uang akan tetapi berilah masyarakat tersebut sebuah bantuan yang memang mereka sangat membutuhkannya, masyarakat miskin

pun merasa kecewa dengan proses pengambilan BLT tersebut karena terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, masyarakat tersebut pun menyatakan bahwasannya mereka sangat berharap kepada Pemerintah untuk menghapus kebijakan ini dan mengeluarkan kebijakan yang lebih baik lagi.

Kesimpulan

A. Penetapan penduduk miskin di Desa Perawang Barat pada tahun 2013 menurut hasil penelitian di atas sebagai berikut :

1. Tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan yang serabutan
2. Penghasilan perbulannya kurang dari Rp1.500.000
3. Tempat tinggal dalam status sewa atau numpang kepada keluarga
4. Melakukan pengobatan hanya di puskesmas terdekat

B. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya 75 responden yang mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar-benar pantas untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak pantas untuk mendapatkan BLT ini semua disebabkan karena 54 responden tersebut memiliki jumlah penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden.

C. Manfaat BLT bagi masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin merasa di hargai oleh Pemerintah dan masyarakat miskin merasa bahwasannya Pemerintah peduli terhadap mereka, dan mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah membuat masyarakat miskin menjadi malas, dapat menyebabkan pertikaian yang terjadi terhadap sesama masyarakat, dan masyarakat merasa ketidak puasan terhadap

proses BLT, lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya oleh karena itulah penyebab BLT haruslah di hapuskan dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik dan lebih mementingkn masyarakat miskin bukan hanya untuk menjaga image Pemerintah saja.

Daftar Pustaka

- Alpan Disman. 2013. Masyarakat Miskin Di Kelurahan Maharatu Rw 09 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Universitas Riau
- Andika Azzi Djannata. 2011. Analisis program program penanggulangan kemiskinan menurut skpd (satuan kerja perangkat daerah) di kota semarang dengan metode ahp (analisis hierarki proses).
- Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi
- Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.
- Susnawita, 2008. Program Bantuan Langsung Tunai Pada Keluarga Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau.